

---

## PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN DELI SERDANG

Ridhon MB Simangunsong<sup>1</sup> Andy Stepanus Hutapea<sup>2</sup> Wilda Vionasari Hutapea<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Dosen Prodi Adm. Bisnis Fisipol UHN

<sup>2,3</sup>Mahasiswa Prodi Adm. Publik dan Prodi Adm. Bisnis Fisipol UHN

[ridhon.mangun@gmail.com](mailto:ridhon.mangun@gmail.com)

**ABSTRAK :** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif karena penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pembiayaan pembangunan di Kabupaten Deli Serdang, dengan teknik analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian secara parsial, pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Deli Serdang, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Deli Serdang. Setiap peningkatan pajak daerah sebesar Rp. 1.000 akan meningkatkan belanja daerah sebesar Rp. 60.270. Setiap peningkatan retribusi daerah sebesar Rp. 1.000 akan meningkatkan belanja daerah sebesar Rp. 97.703. Secara serempak variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Deli Serdang pada tingkat kepercayaan 95 %. Sebesar 92,90 % dari perubahan belanja daerah dapat dijelaskan oleh perubahan pajak daerah dan retribusi daerah, sedangkan sisanya sebesar 7,10 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan sebagai variabel dalam penelitian. Perbedaan antara pengeluaran belanja daerah dan penerimaan daerah Kabupaten Deli Serdang selama tahun 2005 – 2013 selalu mengalami defisit, dan jumlah defisit yang terjadi pada setiap tahun selalu meningkat. Peningkatan jumlah defisit pendapatan dan belanja daerah disebabkan adanya peningkatan belanja daerah yang tidak didukung oleh peningkatan pendapatan asli daerah dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah. Selisih pengeluaran daerah dengan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengalami defisit sehingga harus dipenuhi dari pinjaman pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

**Kata Kunci:** *Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengeluaran Belanja Daerah.*

**ABSTRACT :** The method used in this study is a quantitative study method because it is intended to measure the impact of regional taxes and regional retribution on development financing in the serdang deli district, with linear regression analysis techniques. Partial research results, tax areas affect positive and significant damage to the shopping of district deliserdang, while retribution does not significantly affect the shopping of the district's deli district. In the first semester of 2008, the company's net profit in the first semester of 2008 fell to rp775.1 trillion from rp62.1 trillion in the same period last year. Each increase in regional charges of rp 1,000 will increase the spending of an area by rp 97,703. In unison the region tax variables and county retribution affect significantly the shopping of the district's serrated deli district at a 95% trust rate. 92.90 percent of the change in area spending can be explained by

---

changes in area tax and retribution, while the remainder of which is 7.10 % explained by other variables not included as variables in the research. The difference between the regional spending and the country's rural receipts over 2005-2013 was always running a deficit, and the annual deficit is rising. Increasing amounts of income deficits and regional expenditures are due to an increase in spending areas not supported by an increase in native incomes in the form of land tax and local retribution. Selisish county spending with tax revenues and retribution areas is running a deficit so it must be satisfied from the government loan of the district's deli district.

***Key Words: Land Tax, County Retribution, Area Spending.***

## **PENDAHULUAN**

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju. Untuk melaksanakan pembangunan ini dibutuhkan biaya besar agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara dengan menggali dan mengembangkan semua sumber-sumber penerimaan negara terutama yang berasal dari sektor non migas.

Kebijaksanaan peningkatan penerimaan negara dari sektor non migas terutama dari pajak didasarkan pada keadaan pasaran migas (yang pernah menjadi prioritas untuk melaksanakan pembangunan daerahnya masing-masing yang didasarkan pada kondisi dan potensi daerah yang bersangkutan).

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu bagian dari wilayah negara Republik Indonesia yang turut serta dalam melaksanakan pembangunan. Untuk melaksanakan pembangunan daerah yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan tentu membutuhkan biaya pembangunan yang jumlahnya sangat besar sehingga pengeluaran pemerintah daerah semakin besar di samping pengeluaran rutinnya.

Berbagai cara dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dalam upaya pemenuhan pembiayaan pelayanan publiknya. Pertama, pemerintah daerah memperoleh dana dari sumber yang dikategorikan Pendapatan Asli Daerah. Kedua, memperoleh transfer dana dari APBN yang dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan. Ketiga, daerah memperoleh penerimaan dari sumber lainnya seperti bantuan dana kontinjensi dan bantuan dana darurat. Keempat, menerima pinjaman dari dalam dan luar negeri.

Secara definisi, pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi

---

daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pemerintah daerah harus berusaha menggali dan mengembangkan sumber penerimaan daerah yang disebut dengan Pendapatan Asli daerah (PAD), sehingga sumber pembiayaan belanja untuk pelaksanaan pembangunan daerah tidak lagi terlalu tergantung dari bantuan daerah yang lebih tinggi dan bantuan dari pusat. Jumlah dan kenaikan PAD yang memadai akan menentukan tingkat kemandirian daerah dalam pemenuhan anggaran belanja pembangunan daerahnya sehingga tidak terlalu tergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat.

Belanja daerah merupakan pengeluaran oleh bendahara umum daerah yang mengurangi ekuitas dana jangka pendek pada periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Seluruh pendapatan daerah yang diperoleh baik dari daerahnya sendiri maupun bantuan dari pemerintah pusat akan digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran belanja daerah yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan tentang tanggungjawab politik dan dan administratif pemerintah pusat, provinsi dan daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang tersebut memberi hak dan kewajiban terhadap daerah otonom untuk mengelola keuangan daerah sendiri.

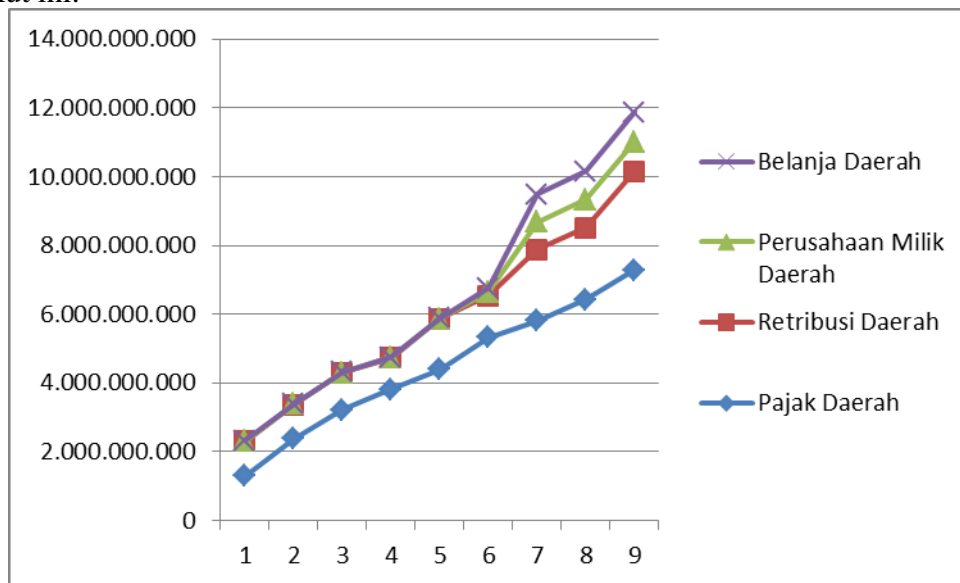
Keberadaan Undang-undang tersebut, daerah dituntut untuk mengembangkan potensi masing-masing guna memenuhi penerimaan daerah. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah . Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan dan pembiayaan.

Daerah dituntut untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang kemudian disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber penerimaan yang menjadi penyangga perekonomian dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah. Daerah yang mampu berotonomi dilihat dari kemampuan keuangan daerah. Maka daerah diharapkan menggali sebesar-besarnya potensi perekonomian yang dimiliki daerahnya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Maka ketergantungan pada

pemerintah pusat harus diminimalkan sehingga PAD menjadi sumber keuangan terbesar.

Kabupaten Deli Serdang sebagai bagian dari daerah otonomi juga berusaha menggali potensi daerahnya guna memenuhi kebutuhan pembiayaan kegiatan daerahnya. Kemandirian daerah sebagai bentuk dari otonomi daerah mengharuskan daerah untuk mengoptimalkan PAD yang merupakan sumber pendanaan bagi pengeluaran Belanja Daerah. Maka, pemerintah Kabupaten Deli Serdang juga berusaha mengoptimalkan PAD yang terdiri dari komponen penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, bagian laba perusahaan milik daerah, penerimaan dinas. Secara nominal pendapatan asli daerah di Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan, tetapi pembelanjaan daerah masih dominan dipenuhi dari dana perimbangan dan dana alokasi umum. Berikut ini perkembangan pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan milik daerah dan belanja daerah selama 9 tahun terakhir (tahun 2005 – 2013) dapat dilihat pada Gambar 1. berikut ini.



Gambar 1. Grafik Perkembangan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Milik Daerah dan Belanja Daerah di Kabupaten Deli Serdang

Pendapatan asli daerah adalah suatu pendapatan yang benar-benar bersumber dari potensi daerah itu sendiri dan pengelolaannya langsung diurus oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah berasal dari pajak negara yang pemungutan dan pengelolaannya diserahkan pada daerah, sehingga pajak tersebut dinamakan pajak daerah. Tujuan penyerahan wewenang kepada daerah adalah agar adanya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Agar daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya perlu

---

diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup walaupun memang tidak semua sumber-sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pajak merupakan masalah masyarakat dan negara. Setiap orang yang hidup dalam suatu negara pasti atau harus berurusan dengan pajak. Oleh karena itu masalah pajak juga menjadi masalah seluruh rakyat dalam suatu negara. Dengan demikian setiap orang sebagai anggota masyarakat harus mengetahui permasalahan yang berhubungan dengan pajak, baik mengenai pengertian, fungsi pajak, jenis-jenis pajak ataupun azas-azas pengutipan yang berlaku di negaranya, juga mengenai tata cara pembayaran pajak serta hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Dengan fungsi mengaturnya (regulerend) pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan dan fungsi mengatur ini banyak ditujukan untuk sektor swasta. Setiap negara yang berdasarkan kepada hukum, dalam mengadakan pemungutan pajak dari masyarakat tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang atau sesuka hati pemerintah, te pemungutan pajak dari masyarakat haruslah berdasarkan undang-undang. Dengan perkataan lain setiap pajak harus sesuai dengan azas-azas pemungutan pajak yang mengandung keadilan. Untuk mencapai kondisi adanya keadilan atau tekanan yang sama bagi para wajib pajak, maka salah satu alatnya adalah tarif. Tarif pajak yang berlaku harus dapat mencerminkan adanya keadilan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif karena penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pembiayaan pembangunan di Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Deli Serdang pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. Penelitian ini menggunakan 1 sumber data, yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi dokumentasi berupa dokumen-dokumen seperti:

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah pemerintah Kabupaten Deli Serdang periode 2005 sampai 2013 serta komponen-komponennya.
2. Realisasi pengeluaran belanja daerah pemerintah Kabupaten Deli Serdang periode 2005 sampai 2013.
3. Dan data lain yang dapat digunakan dalam skripsi ini.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang terkait dengan lingkup penelitian ini selama 9 tahun terakhir. Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis statistik berupa regresi linier berganda. Model persamaannya adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \mu, \text{ dimana:}$$

$$Y = \text{Belanja daerah (Rp/tahun)}$$

- $\beta_0$  = Intercept  
 $\beta_1, \beta_2$  = Koefisien regresi  
 $X_1$  = Pajak daerah (Rp/tahun)  
 $X_2$  = Retribusi daerah (Rp/tahun)  
 $\mu$  = Error term

1. Uji secara individu: Uji t

Untuk mengelidiki apakah masing-masing variabel bebas (pajak daerah, retribusi daerah) secara individual berpengaruh terhadap variabel tidak bebas (Belanja Daerah) maka dilakukan pengujian dengan uji t.

Hipotesis tersebut dirumuskan sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_i = 0$$

$$H_1 : \beta_i \neq 0$$

Rumus untuk  $t_{hitung}$  adalah:

$$t_{hitung} = \frac{\beta_i - \beta}{S(\beta_i)}, \text{ dimana:}$$

$\beta_i$  = koefisien regresi/statistik

$\beta$  = parameter

$S(\beta_i)$  = simpangan baku

Jika:  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_1$  diterima, berarti masing-masing variabel bebas berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.

$t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima, berarti masing-masing variabel bebas berpengaruh tidak nyata terhadap variabel terikat.

2. Uji Kebaikan-Suai

a). Uji secara simultan: Uji F

Selanjutnya dilakukan uji F yang bertujuan untuk melihat apakah pajak daerah dan retribusi daerah berperan nyata secara serempak terhadap pendapatan asli daerah.

Hipotesis yang diajukan adalah:

$$H_0 : \beta_i = 0;$$

$$H_1 : \beta_i \text{ tidak semua nol}$$

Rumus untuk  $t_{hitung}$  adalah:

$$F_{hitung} = \frac{JKR(k-1)}{JKG(n-k)}, \text{ dimana:}$$

JKR = Jumlah kuadrat regresi

JKG = Jumlah kuadrat galat

k = Banyaknya koefisien regresi

Jika:  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima, berarti secara serempak semua variabel bebas berpengaruh tidak nyata terhadap variabel terikat.

---

$F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_1$  diterima, berarti secara serempak semua variabel bebas berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.

b). Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Selanjutnya, koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk melihat seberapa besar keragaman variabel takbebas dapat dijelaskan oleh keragaman variabel bebas.

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat (korelasi yang kuat) di antara variabel bebas. Variabel-variabel bebas yang mempunyai hubungan tidak mungkin dianalisis secara terpisah pengaruhnya terhadap variabel terikat. Pengaruhnya terhadap nilai taksiran :

- a. Nilai-nilai koefisien mencerminkan nilai yang benar.
- b. Karena galat bakunya besar maka kesimpulan tidak dapat diambil melalui uji-t
- c. Uji-t tidak dapat dipakai untuk menguji keseluruhan hasil taksiran.
- d. Tanda yang dihadapkan pada hasil taksiran koefisien akan bertentangan dengan teori.

Salah satu cara untuk mendeteksi gejala multikolinearitas adalah dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factor*), bila nilai  $VIF < 10$  maka dianggap tidak ada pelanggaran multikolinieritas, namun bila sebaliknya  $VIF > 10$  maka dianggap ada pelanggaran multikolinearitas. Untuk mengetahui seberapa kuat atau seberapa parah kolinearitas (korelasi) antar sesama variabel bebas maka dapat dilihat dari matriks korelasi. Bila nilai matriks  $> 0,95$  maka kolinearitasnya serius (tidak dapat ditolerir). Namun bila sebaliknya nilai matriks  $< 0,95$  maka kolinearitas dari sesama variabel bebas masih dapat ditolerir. Cara lain yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dengan menggunakan cara regresi parsial. Cara ini diperoleh dibandingkan dengan nilai  $R^2$  pada regresi model utama. Jika  $R^2$  lebih besar daripada nilai  $R^2$  pada model utama maka terdapat multikolinearitas.

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.

Ada beberapa cara untuk menguji keberadaan serial autokorelasi, yaitu dengan uji: Durbin Watson (uji  $D - W$ ). Uji Durbin-Watson dilakukan dengan membandingkan  $DW_{hitung}$  dengan  $DW_{tabel}$ . Jika terdapat autokorelasi maka galat tidak lagi minim sehingga penduga parameter tidak lagi efisien.

Uji Durbin-Watson dirumuskan sebagai berikut:



$$DW \text{ hitung} = \frac{\sum (\varepsilon_t - (\varepsilon_t - 1)^2)}{\sum \varepsilon_t^2}$$

Dengan jumlah sampel dan jumlah variabel tidak bebas tertentu diperoleh dari nilai kritis  $d_l$  dan  $d_u$  dalam tabel distribusi Durbin-Watson untuk berbagai nilai  $\alpha$ . Secara umum bisa diambil patokan:

- Angka D - W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
- Angka D - W di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.
- Angka D - W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

Uji ini dilakukan untuk menunjukkan simetris tidaknya distribusi data. Uji normalitas akan dideteksi melalui analisa grafis yang dihasilkan melalui perhitungan regresi dengan SPSS. Uji normalitas menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel bebas dan variabel terikat, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak dengan dasar pengambilan keputusan yaitu :

- a. Jika data menyebar sekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal,  $n$  model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka model tersebut tidak memenuhi asumsi normalitas.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan linear diantara variabel bebas dalam model regresi. Hasil SPSS pada Lampiran 1 menunjukkan tidak ada gejala multikolinearitas dimana hasil uji VIF menunjukkan nilai kurang dari 10 ( $VIF < 10$ ).

#### b. Uji Autokorelasi

Untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Tentu saja model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Deteksi autokorelasi dengan melihat besarnya DURBIN-WATSON. Secara umum bisa diambil patokan:

- Angka D - W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
- Angka D - W di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.
- Angka D - W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

Pada bagian MODEL SUMMARY pada Lampiran 1, terlihat angka D - W sebesar + 1,439. Dengan demikian pada semua model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi.

#### c. Uji Normalitas

Uji normalitas menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel bebas dan variabel terikat, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model

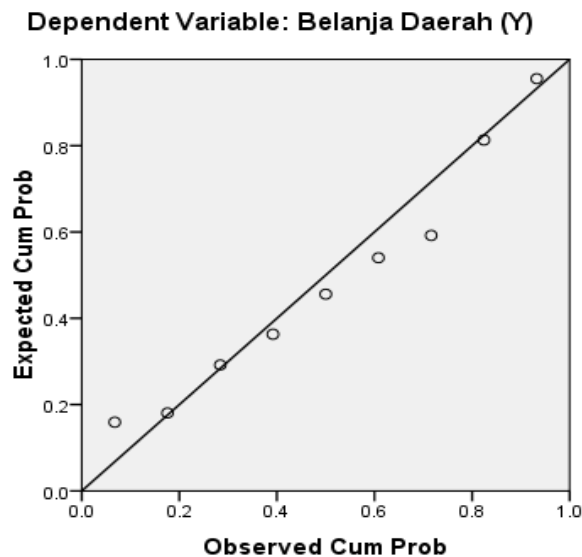


regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Deteksi normalitas dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusan :

- Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Grafik *Normal P-P Plot* dapat dilihat pada gambar berikut.

**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**



**Gambar 2. Normal P-P Plot**

Dari grafik *Normal P-P Plot* terlihat titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Hal ini berarti data yang digunakan sudah memenuhi asumsi normalitas, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi belanja daerah berdasarkan masukan variabel bebasnya.

### Uji t (Uji Parsial)

Untuk mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat maka digunakan Uji t. Variabel yang digunakan adalah pajak daerah dan retribusi daerah sebagai variabel bebas, serta belanja daerah sebagai variabel terikat. Hasil pengujian dengan menggunakan SPSS adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.**  
**Hasil Uji t**

		Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	-139873401.566	5.067E7		-2.761	.033		
	Pajak Daerah (X1)	60.270	19.704	.640	3.059	.022	.270	3.710
	Retribusi Daerah (X2)	97.703	57.038	.358	1.713	.138	.270	3.710

a. Dependent Variable: Belanja Daerah (Y)

Berdasarkan Tabel 1. maka diperoleh persamaan umum sebagai berikut:

$$Y = -139.828.401,566 + 60,270 X_1 - 97,703 X_2$$

**a. Konstanta**

Berdasarkan hasil estimasi data dalam model regresi terdapat nilai konstanta sebesar  $-139.828.401,566$ . Nilai konstanta bertanda negatif menggambarkan tingkat nilai rata-rata belanja daerah akan mengalami kecenderungan menurun sebesar  $139.828.401,566$  ketika pajak daerah dan retribusi daerah adalah tetap. Dengan kata lain, belanja daerah akan turun sebesar  $139.828.401,566$  jika pajak daerah dan retribusi daerah sama dengan nol.

**b. Pengaruh pajak daerah terhadap belanja daerah**

Persamaan regresi menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel pajak daerah adalah  $60,270$ . Artinya setiap peningkatan pajak daerah sebesar Rp. 1.000 akan meningkatkan belanja daerah sebesar Rp.  $60.270$ . Nilai t-hitung dari koefisien regresi pajak daerah adalah sebesar  $3,059$ , sedangkan nilai t-tabel 5 % dengan derajat bebas 6 ( $9-3$ ) adalah sebesar  $1,943$ . Nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel 5 % sehingga diputuskan untuk menerima  $H_1$ . Artinya, secara parsial pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada tingkat kepercayaan 95 %.

**c. Pengaruh retribusi daerah terhadap belanja daerah**

Persamaan regresi menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel retribusi daerah adalah  $97,703$ . Artinya setiap peningkatan retribusi daerah sebesar Rp. 1.000 akan meningkatkan belanja daerah sebesar Rp.  $97.703$ . Nilai t-hitung dari koefisien regresi adalah sebesar  $1,713$ , sedangkan nilai t-tabel 5 % dengan derajat bebas 6 ( $9-3$ ) adalah sebesar  $1,943$ . Nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel 5 % sehingga disimpulkan menolak  $H_1$ . Artinya, secara parsial retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah pada tingkat kepercayaan 95 %.

### Uji F (Uji Serempak)

Untuk mengetahui pengaruh serempak variabel bebas terhadap variabel terikat maka digunakan uji F. Hasil pengujian dengan menggunakan SPSS adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.**  
**Hasil Uji F**

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.536E17	2	1.268E17	39.413	.000 <sup>a</sup>
	Residual	1.930E16	6	3.217E15		
	Total	2.729E17	8			

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah (X2), Pajak Daerah (X1)

b. Dependent Variable: Belanja Daerah (Y)

Dari Tabel 2. dapat dilihat bahwa nilai F-hitung adalah 39,413, sedangkan nilai F-tabel 0,05 adalah 5,41. Karena F-hitung lebih besar dari F-tabel maka disimpulkan menerima  $H_1$ . Artinya, secara serempak variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah pada tingkat kepercayaan 95 %.

### Uji Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur kebaikan suai model dapat menerangkan variasi variabel terikat. Nilai  $R^2$  dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

**Tabel 3.**  
**Koefisien Determinasi  $R^2$**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.964 <sup>a</sup>	.929	.906	5.67223E7	1.439

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah (X2), Pajak Daerah (X1)

b. Dependent Variable: Belanja Daerah (Y)

Dari Tabel 3. dapat dilihat bahwa koefisien determinasi (*R Square*) variabel pajak daerah dan retribusi daerah adalah 0,929. Artinya, sebesar 92,90 % keragaman variabel belanja daerah dapat dijelaskan oleh perubahan pajak daerah dan retribusi daerah secara serempak.

---

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil evaluasi maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara parsial, pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Deli Serdang, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Deli Serdang. Setiap peningkatan pajak daerah sebesar Rp. 1.000 akan meningkatkan belanja daerah sebesar Rp. 60.270. Setiap peningkatan retribusi daerah sebesar Rp. 1.000 akan meningkatkan belanja daerah sebesar Rp. 97.703.
2. Secara serempak variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Deli Serdang pada tingkat kepercayaan 95 %. Sebesar 92,90 % dari perubahan belanja daerah dapat dijelaskan oleh perubahan pajak daerah dan retribusi daerah, sedangkan sisanya sebesar 7,10 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan sebagai variabel dalam penelitian.
3. Perbedaan antara pengeluaran belanja daerah dan penerimaan daerah Kabupaten Deli Serdang selama tahun 2005 – 2013 selalu mengalami defisit, dan jumlah defisit yang terjadi pada setiap tahun selalu meningkat. Peningkatan jumlah defisit pendapatan dan belanja daerah disebabkan adanya peningkatan belanja daerah yang tidak didukung oleh peningkatan pendapatan asli daerah dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah.
4. Selisih pengeluaran daerah dengan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengalami defisit sehingga harus dipenuhi dari pinjaman pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

### **Saran**

Dari hasil penelitian disarankan:

1. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang perlu lebih memperhatikan segala permasalahan yang menyangkut pendapatan asli daerah seperti khususnya pajak daerah. Karena hanya pajak yang berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran belanja daerah di Kabupaten Deli Serdang.
2. Pemerintah perlu berupaya agar retribusi daerah meningkat setiap tahun, dengan demikian pengaruhnya akan signifikan terhadap belanja daerah.
3. Pemerintah perlu menyeimbangkan antara pengeluaran dengan pendapatan asli daerah.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, **Statistik Indonesia**. 2005 - 2013.
- Halim, Abdul, **Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah**, Cetakan Ketiga, Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Hamdan, Lini, **Perpajakan**, Edisi Pertama, Cetakan Kedelapan, Jakarta: Bina Aksara, 2004.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah, **Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah**, Jakarta: Salemba Empat, 2005.
- Mahmudi, **Manajemen Keuangan Daerah**, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Munawir, S., **Perpajakan**, Cetakan Kelima, Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Panderaja, S., **Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah dalam Hubungannya dengan Pembangunan Ekonomi**, Cetakan Ketiga, Jakarta: Salemba Empat, 2004.
- Santoso, R. Brotodiharjo, **Pengantar Ilmu Hukum Pajak**, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Bandung: Eresco, 2005.
- Sukirno, Sadono, **Beberapa Aspek dalam Persoalan Pembangunan Daerah**, Edisi Pertama, Cetakan Keempat, Jakarta: LPFEUI, 2003.
- Suryana, **Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan**, Edisi Ketiga, Cetakan Kedua, Jakarta: Salemba Empat, 2005.
- Usman, B. dan K. Subroto, **Pajak-pajak Indonesia**, Cetakan Keenam, Jakarta: Yayasan Bina Pajak, 2007.
- Winardi, **Kamus Ekonomi**, Bandung: Alumni, 2005.